



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, selain gaji PNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 22);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
11. Bank Sumut adalah Bank Sumut Cabang Binjai.
12. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Binjai yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
15. Sistem pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk peningkatan dan motivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dan kesejahteraan PNS, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS diberikan berdasarkan pendekatan beban kerja dan kondisi kerja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan eselon dan non eselon sesuai dengan pangkat dan golongan.

(3) Tambahan

- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima tambahan penghasilan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya telah dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan.
- (6) PNS yang menduduki jabatan eselon IV dan III yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) pada PD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh tambahan penghasilan eselon yang ditugaskan.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti besar; dan
- e. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan atas jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat.
- (2) Tambahan penghasilan PNS yang diberikan atas jabatan non struktural dan jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jabatan non struktural didasarkan pada :
 1. staf golongan 1 (satu);
 2. staf golongan 2 (dua);
 3. staf golongan 3 (tiga); dan
 4. staf golongan 4 (empat).
 - b. jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat didasarkan pada :
 1. Auditor Pertama;
 2. Auditor Muda; dan
 3. Auditor Madya.

(3) Besaran

- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui bendahara pengeluaran PD masing-masing.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD secara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening PD yang terdapat di Bank Sumut.
- (4) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan paling lama pada awal bulan selanjutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dari jumlah yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5 %;
 - c. PNS gol IV/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran PD yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Pejabat penanggungjawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala PD selaku pengguna anggaran.

Pasal 11

- (1) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Kepala PD untuk PNS eselon III, IV, V dan Staf pada masing-masing PD.
- (2) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk PNS eselon II.
- (3) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Walikota untuk Sekretaris Daerah.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

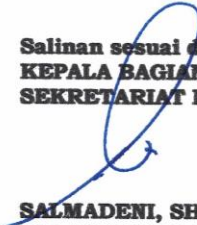
Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 31 Januari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M.MAHFULLAH P.DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
 BINJAI
 TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN JABATAN
 STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL

NO.	JABATAN STRUKTURAL, STAF, DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT KOTA BINJAI	BESARAN PERBULAN (Rp)
	I. JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN STAF	
1.	Eselon II.a (Sekretaris Daerah)	28.000.000,00
2.	Eselon II.b :	
	a. Asisten	13.800.000,00
	b. Staf Ahli Walikota	13.800.000,00
	c. Kepala SKPD	6.600.000,00
3.	Eselon III. :	
	a. Camat	5.000.000,00
	b. Kepala Bagian	3.000.000,00
	c. Non Camat dan Kepala Bagian	1.680.000,00
4.	Eselon IV/a:	
	a. Eselon IV/a (Lurah)	1.500.000,00
	b. Eselon IV/a	840.000,00
5.	Eselon IV/b	750.000,00
6.	Eselon V	740.000,00
7.	Staf :	
	a. Golongan IV	740.000,00
	b. Golongan III	640.000,00
	c. Golongan II dan I	540.000,00
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Sekretariat DPRD	
	a. Eselon II	10.000.000,00
	b. Eselon III	4.000.000,00
	c. Eselon IV	3.000.000,00
	d. Staf Gol.IV	1.177.000,00
	e. Staf Gol. III	900.000,00
	f. Staf Gol. II dan I	800.000,00
9.	Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informatika	
	a. Eselon II	9.000.000,00
	b. Eselon III	4.000.000,00
	c. Eselon IV	1.800.000,00
	d. Staf	1.200.000,00
10.	Badan Penanggulangan Bencana:	
	a. Eselon III	4.800.000,00
	b. Eselon IV	1.800.000,00
	c. Staf	1.200.000,00

NO.	JABATAN STRUKTURAL, STAF, DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT KOTA BINJAI	BESARAN PERBULAN (Rp)
11.	Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	a. Eselon II	9.000.000,00
	b. Eselon III	4.000.000,00
	c. Eselon IV	2.000.000,00
	d. Staf	1.200.000,00
12.	Bagian Hukum, Bagian Adm. Pemerintahan Dan Kerjasama	
	a. Eselon III	5.000.000,00
	b. Eselon IV	3.000.000,00
	c. Staf Gol. III	900.000,00
	d. Staf Gol. II dan I	800.000,00
	II. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PADA INSPEKTORAT KOTA BINJAI	
	a. Inspektur Kota	10.000.000,00
	b. Auditor Madya dan Eselon III	4.000.000,00
	c. Auditor Muda dan Eselon IV	3.000.000,00
	d. Auditor Pertama	1.500.000,00
	e. Staf Gol.IV	1.177.000,00
	f. Staf Gol. III	900.000,00
	g. Staf Gol. II dan I	800.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM